

**HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

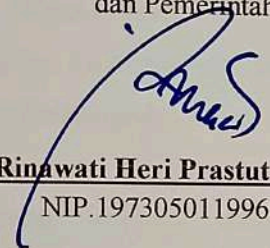
Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

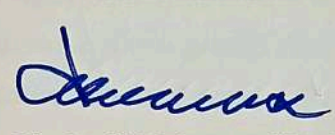
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


Rinawati Heri Prastuti, SE, M.M
NIP.197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan


Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M
NIP.19681117 199003 1 002

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


DWI SUKARMEI, S.T., M.T

Pembina

NIP. 197405082003121008

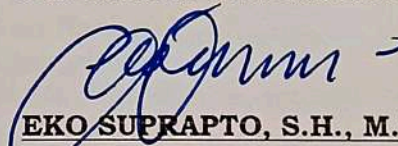
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, 4 Juli 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan Latar Belakang	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023.....	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
2.6 Inovasi Perangkat daerah	44
2.7 Penghargaan / Prestasi	44
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	49
4.1. Program dan Kegiatan	49
BAB V PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023.....	24
Tabel 2.3 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023.....	32
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	37
Tabel 2.5 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	44
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	47
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	51
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menetapkan arah dan prioritas pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan merupakan proses yang dinamis dan terus-menerus, yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan juga berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Perencanaan pembangunan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang baik dan efektif. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan yang buruk akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, ketidakadilan, dan kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Indonesia.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Perencanaan pembangunan melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan juga melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan yang baik harus memperhatikan aspek-aspek tersebut secara holistik dan terpadu. Perencanaan pembangunan yang baik juga harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan pembangunan yang partisipatif akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang baik dan efektif. Perencanaan pembangunan yang baik akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional, daerah, dan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan yang buruk akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, ketidakadilan, dan kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

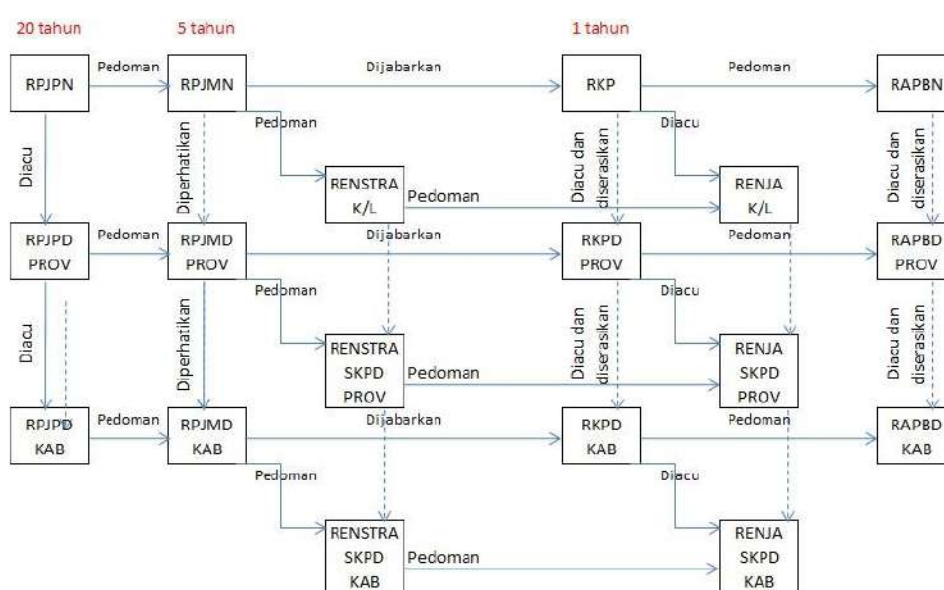
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Inspektorat Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Inspektorat;
- 5) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 6) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 7) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
- 8) Data Pokok Pembangunan Inspektorat; dan
- 9) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan

Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Inspektorat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Inspektorat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional;
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Inspektorat.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Dikarenakan Inspektorat Kabupaten Temanggung bukan perangkat daerah yang mengapu kegiatan masyarakat. Untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata Kelola;

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat;

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Inspektorat Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Inspektorat Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Inspektorat Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Perubahan renstra Inspektorat 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01	PENGAWASAN				5.279.387.681				4.514.386.210	5.259.059.360		5.109.330.438			
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		-	4.460.887.681	-	-	100	4.306.386.210	4.848.690.363	100	4.731.948.329	100	97,59	
601012.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	4.152.387.681	-	-	13	3.941.386.210	4.599.189.664	13	4.500.917.726	98,21	97,86	
601012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	-	4.137.387.681	-	-	13	3.926.386.210	4.589.190.264	14	4.491.209.726	96,43	97,86	
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Bulan	-	-	-	-	14	2.321.369.638	2.544.980.510	13	2.488.367.972	92,86	97,78	
		Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	12	1.605.016.572	2.044.209.754	12	2.002.841.754	100	97,98	
601012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Bulan	-	15.000.000	-	-	12	15.000.000	9.999.400	12	9.708.000	100	97,09	
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682		93,30	
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kegiatan	-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682	100	93,30	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	191.000.000	-	-	12	143.000.000	154.950.000	12	139.734.249		90,18	
601012.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	3.000.000	-	-	12	2.000.000	1.992.100	12	1.977.500	100	99,27	
601012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	-	30.000.000	-	-	12	36.000.000	24.000.000	12	22.704.500	100	94,60	
601012.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	-	45.000.000	-	-	12	45.000.000	44.999.900	12	40.366.950	100	89,70	
601012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	-	50.000.000	-	-	12	-	33.960.000	12	29.012.050	100	85,43	
601012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	-	60.000.000	-	-	12	60.000.000	49.998.000	12	45.673.249	100	91,35	
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	-	10.000.000	-	-	12	7.000.000	7.000.000	12	6.981.900		99,74	
601012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	4.000.000	4.000.000	12	3.981.900	100	99,55	
601012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	3.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100,00	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	-	77.500.000	-	-	12	65.000.000	64.990.799		63.266.772		97,35	
601012.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	-	70.000.000	-	-	12	60.000.000	59.992.699	12	58.271.772	100	97,13	
601012.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	-	7.500.000	-	-	12	5.000.000	4.998.100	12	4.995.000	100	99,94	
Rata-rata capaian kinerja Program												99,17			
Predikat												Sangat Tinggi			
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan				475.000.000					214.347.097	27	196.529.539			
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46				35			35,21		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23				10			12,37		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48				15			15,46		100		
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				380.000.000				409.000.000	179.933.497	-	167.201.188			
601022.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja	OPD	-	30.000.000	-	-	3	54.000.000	7.451.700	3	7.277.500	100	97,66	
601022.01.03	Reviu Laporan Kinerja			-	110.000.000	-	-		100.000.000	69.209.100	-	61.248.292	98,91	88,50	
		Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP	OPD	-	-	-	-	46	-	-	45	-	97,83		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksananya reviu Renja , RKPD, RKPD Perubahan, Reviu LPPD	Dokumen	-	-	-	-	13	-	-	13	-	100		
601022.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ	Dokumen	-	80.000.000	-	-	25	45.000.000	46.941.697	31	45.686.600	100	97,33	
601022.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa	LHP	-	80.000.000	-	-	45	210.000.000	14.694.000	51	14.694.000	100	100	
601022.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			-	-	-	-			41.637.000	-	38.294.796	100	91,97	
		Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	-	-	-	-	115	-	-	126	-	100		
		Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	12	-	100		
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									34.413.600	-	29.328.351		85,22	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601022.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Person	-	-	-	-	100		5.813.500	100	3.625.451	100	62,36	
601022.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASB, Reviu HSPK/ SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas	Laporan	-	-	-	-	69,00		28.600.100	40	25.702.900	57,97	89,87	
Rata-rata capaian kinerja Program												95,88			
Predikat												Sangat Tinggi			
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								208.000.000	196.021.900	-	180.852.570		92,26	
		Nilai Maturitas SPIP	Angka	2				3,15			3		96,67		
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60				20			40,00		100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Nilai Survey Penilaian Integritas	%	81,97				81,57			78,70		96,48		
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100				100			100		100		
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							10		25.268.800	10	24.126.923	100	95,48	
601032.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional regional, larwasda, desk PKPT	Kegiatan	-	-	-	-	10		25.268.800	10	24.126.923	100	95,48	
601032.02	Pendampingan dan Asistensi							-	208.000.000	170.753.100	-	156.725.647		91,78	
601032.02.03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			-	-	-	-	-	-	138.246.100	-	125.178.591	99,14	90,55	
		Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke Pusat	Person	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
		Terfasilitasinya pengaduan gratifikasi	Person	-	-	-	-	100	-	-	100	-	100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Terlaksana laporan pajak-pajak pribadi (4000) dan kekayaan melalui aplikasi SIKARKA (500)	Laporan	-	-	-	-	4.500		-	4.346	-	96,58		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan audiensi saber pungli	Kegiatan	-	-	-	-	3	-	-	3	-	100		
		Terlaksana pemenuhan elemen ZI	OPD	-	-	-	-	5	-	-	12	-	100		
601032.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	OPD	-	-	-	-	46	60.000.000	32.507.000	46	31.547.056	100	97,05	
Rata-rata capaian kinerja Program												88,41			
Predikat												Tinggi			
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG								4.514.386.210	5.259.059.360		5.109.330.438			
Rata-rata capaian kinerja Program Kegiatan												94,49	97,15		
Predikat												Sangat tinggi			
rata-rata capaian kinerja Program												99,24			
Predikat												Akan Tercapai			

Dari Tabel 2.1. diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN target tercapai 100%;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target sudah tercapai 100 %;
 - c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target sudah tercapai 100%;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target tercapai 100 %;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target tercapai 100%;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target tercapai 100%;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu target tercapai 100%;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target tercapai 100%;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target tercapai 100%;
 - j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tercapai 100%;

- k. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target tercapai 100%;
 - l. Sub Kegiatan Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja target tercapai 100%;
 - m. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPSub Kegiatan target tercapai 100%;
 - n. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah target tercapai 100%;
 - o. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan target tercapai 100%;
 - p. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target tercapai 100%;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut ;
- a. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan target tercapai 124%;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Desa target tercapai 113% ;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
- a. Sub kegiatan pengawasan dengan Tujuan tertentu target tercapai 57,97%.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Akan Tercapai** yaitu dengan nilai **99.24%**.. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan :
 - a. Indeks Persepsi Anti Korupsi, tercapai 100,3% dari target yang ditentukan yaitu nilai 3,6 tercapai 3,61.
2. Indikator Sasaran :
 - a. Persentase tindak lanjut hasil temuan, mencapai 100 %;
 - b. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi mencapai 100,6 %;
 - c. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara mencapai 123,7%;
 - d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa mencapai 103%;
 - e. Nilai Maturitas SPIP mencapai 96,67 %;
 - f. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mencapai 200%;
 - g. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi mencapai 100%;
 - h. Nilai Survey Penilaian Integritas mencapai 96,48%; dan
 - i. Persentase penanganan aduan masyarakat mencapai 100%;

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Data Pokok Perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 1 (satu) Indikator yaitu:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Adapun hasil capaian kinerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
A	INDIKATOR SASARAN															
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,92	3,92	3,61			95		AT	
B	INDIKATOR PROGRAM															
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT		
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46	n.a	n.a	35,21			76,55		AT	
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%			10	17	23			12,37			53,76			UK
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%			15	31	48			15,46			32,20			UK
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045	3,045	3,045			92,27		AT	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60			40			67		AT	
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100			100	TT		
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97	n.a		78,70			96,01		AT	
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	100	100	100	100	n. a		100			100	TT		
			Capaian Kinerja Sasaran										95,00	0	1	0
			Capaian Kinerja Program										77,18	3	4	2
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah										86,09	3	5	2

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

I. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 3 terdiri dari:

1. Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
- Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :

- Kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
- SDM APIP kurang/terbatas.

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
- Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
- Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

2. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
- Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
- Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
- Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,

b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah:

- Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
- Kurangnya SDM auditor;
- Kurang pemahannya OPD mengenai benturan kepentingan;
- Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
- Sosialisasi benturan kepentingan;
- Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

3. Persentase penanganan aduan masyarakat

a. Faktor Pendorong Indikator tersebut adalah :

- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- SOP Pengaduan Masyarakat

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :

- Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat

II. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 4 terdiri dari :

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
- nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut :

- Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM);

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
- Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
- Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;

- Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM.
2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah
- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP
- b. Faktor Penghambat Indikator tersebut:
- kurang pahami auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP
 - Kurang Pahami Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP;
 - waktu pelaksanaan reviu yang kurang
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- Melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor;
 - Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;
 - Pelaksanaan Reviu dilaksanakan dengan karantina
3. Nilai Maturitas SPIP
- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
- Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung;

- Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung
- b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :
- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
 - Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun)
4. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;

- Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - Adanya mutasi pegawai
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
- Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
 - Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas
5. Nilai Survey Penilaian Integritas
- a. Faktor pendorong Indikator kinerja tersebut :
- Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- b. Faktor penghambat indikator kinerja tersebut :
- Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- Berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat

III Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 (dua) terdiri dari:

1. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara
 - a. Faktor Pendorong Indikator Kinerja tersebut :
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah

Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya,

- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

b. Faktor Penghambat Indikator Kinerja tersebut :

- pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
- Jumlah Personil terbatas

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu;
- Personil melaksanakan tugas tambahan

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	INDIKATOR SASARAN						
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
B	INDIKATOR PROGRAM						
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah	%	n.a	n.a	10	17	23

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
	dan tuntutan atas kerugian negara						
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	15	31	48
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	100	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 10 indikator kinerja kegiatan terdapat 7 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hal ini disebabkan oleh :

 - Pengendalian risiko organisasi belum memadai;

- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);

b. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi

Hal ini disebabkan antara lain :

- kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP,
- Kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP,
- waktu pelaksanaan reuiu yang kurang.

c. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

Hal ini disebabkan antara lain:

- pelaksanaan reuiu dengan waktu yang mendesak;
- Jumlah Personil terbatas

d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa

Hal ini disebabkan antara lain:

- belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa
- jumlah personil yang terbatas
- belum semuanya dapat dilakukan pengawasan

e. Nilai Maturitas SPIP

Hal ini disebabkan antara lain :

Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;

- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia

f. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Hal ini disebabkan antara lain :

- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
- Adanya mutasi pegawai

g. Nilai Survey Penilaian Integritas

Hal ini disebabkan antara lain :

- Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
- b. Upaya peningkatkan Nilai Survei Penilaian Integritas;
- c. Peningkatan Pendampingan Perangkat Daerah yang diusulkan menuju ZI;
- d. Upaya Peningkatan Nilai MCP Kabupaten Temanggung;
- e. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- f. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;

- g. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- h. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung 2021

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					6.604.096.827
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.835.664.827
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.459.664.827
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	5.449.664.827

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					6.604.096.827
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.835.664.827
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.459.664.827
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	orang/bulan	5.449.664.827

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1 II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3	4	5	6	7 468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksakanya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1 II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3	4	5	6	7 468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksakanya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3	4	5	6	7 50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3	4	5	6	7 50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2 Pendampingan dan Asistensi	3	4	5	6	7 263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2 Pendampingan dan Asistensi	3	4	5	6	7 263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program asistensi dengan kegiatan pendampingan kepada desa dengan tema “Satu Irban Satu Binaan” dalam arti pada Tahun 2022 setiap Irban mempunyai 1 (satu) Desa binaan di Kecamatan yang akan menjadi desa percontohan pada Kecamatan tersebut. Sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung
2019-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Satu Irban Satu Binaan	Inspektorat Kecamatan, Masyarakat Desa	APBD	Pendampingan	Desa Binaan	Desa Binaan sebagai percontohan pada Kecamatan	Inspektorat - 2023

2.7 Penghargaan/Prestasi

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada Level 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan

kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2023	Kondisi Akhir 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan			a. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,8	3.8
		1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100
				2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46	46
				3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23	23

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2023	Kondisi Akhir
				4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48	48
		2. Meningkatkan kualitas implemementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100
				2. Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60	60
				3. Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100
				4. Nilai Survey Penilaian Integritas		81,97	81,97
				5. Nilai maturitas SPIP	nilai	3,3	3,3
				Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi pada penambahan pagu anggaran sebesar Rp.44.712.000,-. Penambahan anggaran untuk menambah belanja makan minum harian untuk sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu sebesar Rp.27.830.000,- dan sub kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya sebesar Rp. 16.882.000,-

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH	6.648.808.827		INSPEKTORAT DAERAH	6.604.096.827	(44.712.000)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.880.376.827	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.835.664.827	(44.712.000)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.459.664.827	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.459.664.827	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.449.664.827	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.449.664.827	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.830.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.000.000	(27.830.000)
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.830.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	(27.830.000)
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.000.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.000.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.000.000	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.000.000	
a	Pengadaan Mebel	35.000.000	a	Pengadaan Mebel	35.000.000	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	
b	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	b	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
5.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.882.000	5.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	(16.882.000)
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	16.882.000	a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	0	(16.882.000)
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	468.716.000	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	468.716.000	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	418.716.000	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	418.716.000	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8.000.000	a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8.000.000	
b	Reviu Laporan Kinerja	110.000.000	b	Reviu Laporan Kinerja	110.000.000	
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	
d	Pengawasan Desa	85.000.000	d	Pengawasan Desa	85.000.000	
e	Kerjasama Pengawasan Internal	0	e	Kerjasama Pengawasan Internal	0	
f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	135.716.000	f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	135.716.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50.000.000		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50.000.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.000.000		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	39.000.000		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	39.000.000	

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	299.716.000		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	299.716.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	36.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	36.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	36.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	263.716.000		Pendampingan dan Asistensi	263.716.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	230.716.000		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	230.716.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.000.000	

Sumber

:

RKPD

Kab.

Temanggung

Tahun

2023

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				6.648.808.827	5.468.258.402	5.259.058.960	5.109.330.438	97,15	6.898.000.000					
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.880.376.827	4.704.071.052	4.848.689.963	4.731.948.329	97,59	6.038.000.000					
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.459.664.827	4.428.946.653	4.599.189.664	4.500.917.726	97,86	5.460.000.000				
6	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	35	orang/bulan	5.449.664.827	4.418.946.653	4.589.190.264	4.491.209.726	97,86	5.450.000.000	DAU
6	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	12	Dokumen	10.000.000	10.000.000	9.999.400	9.708.000	97,09	10.000.000	DAU
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000	20.000.000	22.559.900	21.047.682	93,30	60.000.000	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Temanggung	37	Orang	20.000.000	20.000.000	22.559.900	21.047.682	93,30	60.000.000	DAU
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.830.000	144.131.000	154.949.600	139.734.249	90,18	173.000.000	
6	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Temanggung	5	Paket	2.000.000	2.000.000	1.992.100	1.977.500	99,27	3.000.000	DAU
6	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Temanggung	12	Paket	25.000.000	25.000.000	24.000.000	22.704.500	94,60	30.000.000	DAU
6	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Temanggung	12	Paket	35.000.000	40.000.000	44.999.500	40.366.950	89,71	40.000.000	DAU
6	01	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	12	Laporan	42.830.000	15.000.000	33.960.000	29.012.050	85,43	30.000.000	DAU
6	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggara	Temanggung	12	Laporan	68.000.000	62.131.000	49.998.000	45.673.249	91,35	70.000.000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
					dan Konsultasi SKPD	an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				135.000.000	40.000.000	-	-	-	250.000.000		
6	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Temanggung	10	Unit	35.000.000	35.000.000			-	50.000.000	DAU
6	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Temanggung	10	Unit	100.000.000				-	200.000.000	DAU
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	5.000.000			-		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.000.000	7.993.400	7.000.000	6.981.900	99,74	10.000.000		
6	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	12	Laporan	5.000.000	5.000.000	4.000.000	3.981.900	99,55	5.000.000	DAU
6	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Temanggung	12	Laporan	4.000.000	2.993.400	3.000.000	3.000.000	100	5.000.000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
						Disediakan										
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.000.000	62.999.999	64.990.799	63.266.772	97,35	85.000.000	DAU	
6	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Temanggung	15	Unit	60.000.000	59.999.999	59.992.699	58.271.772	97,13	70.000.000	DAU
6	01	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Temanggung	6	Unit	2.500.000					5.000.000	DAU
6	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Temanggung	23	Unit	4.500.000					10.000.000	DAU
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.000.000	4.998.100	4.995.000	99,94			
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				16.882.000							

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
6	01	01	2.04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Temanggung	46	Paket	16.882.000						
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					468.716.000	466.413.150	214.347.097	196.529.539	91,69	520.000.000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000	416.999.650	179.933.497	167.201.188	92,92	460.000.000	
6	01	02	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Temanggung	4	Laporan	8.000.000	7.499.650	7.451.700	7.277.500	97,66	10.000.000	DAU
6	01	02	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	54	Laporan	110.000.000	110.000.000	69.209.100	61.248.292	88,50	125.000.000	DAU
6	01	02	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	64	Laporan	80.000.000	80.000.000	46.941.697	45.686.600	97,33	85.000.000	DAU
6	01	02	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Temanggung	52	Laporan	85.000.000	84.500.000	14.694.000	14.694.000	100,00	90.000.000	DAU
6	01	02	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal					60.000.000						
6	01	02	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	Temanggung	180	Dokumen	135.716.000	75.000.000	41.637.000	38.294.796	91,97	150.000.000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Program/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
						Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				50.000.000	49.413.500	34.413.600	29.328.351	85,22	60.000.000		
6	01	02	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Temanggung	5	Laporan	11.000.000	10.813.500	5.813.500	3.625.451	62,36	15.000.000	DAU
6	01	02	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	3	Laporan	39.000.000	38.600.000	28.600.100	25.702.900	89,87	45.000.000	DAU
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				299.716.000	297.774.200	196.021.900	180.852.570	92,26	340.000.000		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				36.000.000	35.268.700	25.268.800	24.126.923	95,48	40.000.000		
6	01	03	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	1	Rekomendasi	36.000.000	35.268.700	25.268.800	24.126.923	95,48	40.000.000	DAU

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
						yang Disusun										
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				263.716.000	262.505.500	170.753.100	156.725.647	91,78	300.000.000		
6	01	03	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	15	Kegiatan	230.716.000	230.000.000	138.246.100	125.178.591	90,55	250.000.000	DAU
6	01	03	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Temanggung	10	Perangkat Daerah	33.000.000	32.505.500	32.507.000	31.547.056	97,05	50.000.000	DAU

Sumber : Inspektorat Kabupaten temanggung Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

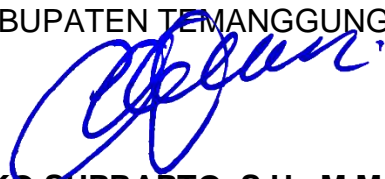
Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 97,15%. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.648.808.827,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022.
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

